

7-31-2024

Analysis of the Suitability of the Capacity and Quality of the Jakarta Government in Implementing SNI 03-1733-2004 and the Long Term Regional Development Plan for Jakarta 2005 – 2025

Nur Iman Santoso

Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia, nurimans@gmail.com

Lita Sari Barus

Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/cudj>



Part of the [Development Studies Commons](#)

Recommended Citation

Santoso, Nur Iman and Barus, Lita Sari (2024) "Analysis of the Suitability of the Capacity and Quality of the Jakarta Government in Implementing SNI 03-1733-2004 and the Long Term Regional Development Plan for Jakarta 2005 – 2025," *Cities and Urban Development Journal*: Vol. 2: No. 1, Article 5.

DOI: 10.7454/cudj.v2i1.1024

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/cudj/vol2/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Cities and Urban Development Journal by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF THE CAPACITY AND QUALITY OF THE
JAKARTA GOVERNMENT IN IMPLEMENTING SNI 03-1733-2004 AND THE LONG
TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN FOR JAKARTA 2005 – 2025**

**ANALISIS KESESUAIAN KAPASITAS DAN KUALITAS PEMERINTAHAN
JAKARTA DALAM PENERAPAN SNI 03-1733-2004 DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) JAKARTA 2005 – 2025**

***Nur Iman Santoso, Lita Sari Barus**

Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Jakarta Pusat, Indonesia

Abstrak

Latar Belakang: Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia adalah pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik yang penting. Keanekaragaman etnis memengaruhi akses masyarakat ke fasilitas politik seperti kantor pemerintah, tempat pemungutan suara, dan pusat informasi.

Tujuan: Penelitian bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas pemerintahan, diperlukan pengembangan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintah guna mewujudkan tata kelola yang baik, dalam implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004.

Metode: Studi literasi dan kependudukan dalam implementasi SNI 03-1733-2004.

Hasil: Dari 44 kecamatan, hanya 15 yang sesuai dengan SNI, dan dari 267 kelurahan, hanya 125 yang memenuhi standar dan menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas dan layanan publik.

Kesimpulan: Mengatasi tantangan aksesibilitas, keamanan, dan partisipasi masyarakat adalah kunci menciptakan lingkungan politik yang demokratis dan inklusif, memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan politik yang bermanfaat bagi semua warga Jakarta.

Kata kunci: SNI 03-1733-2004, Fasilitas Publik, RPJPD Jakarta 2005-2025

Abstract

Background: The Province of Special Capital Region (DKI) Jakarta, as the capital city of Indonesia, is an important center for government, economy, and politics. The ethnic diversity influences the community's access to political facilities such as government offices, polling stations, and information centers.

Aims: The research aims to analyze the enhancement of government capacity. It is necessary to develop the professionalism of government officials and institutions to achieve good governance in the implementation of Indonesian National Standard (SNI) 03-1733-2004.

Methods: Literature and demographic studies were conducted to implement SNI 03-1733-2004.

Results: Out of 44 sub-districts, only 15 meet the SNI, and out of 267 urban villages, only 125 comply with the standard. This indicates a need for improvements in public facilities and services.

Conclusion: Addressing the challenges of accessibility, security, and community participation is key to creating a democratic and inclusive political environment. Collaboration between the government, community, and stakeholders is required to support political activities beneficial to all Jakarta residents.

Keywords: SNI 03-1733-2004, Public Facilities, RPJPD Jakarta 2005-2025

Corresponding Author*: Nur Iman Santoso
E-mail: nurimans@gmail.com
Affiliation: Universitas Indonesia Maju, Indonesia

Article history

Received: June 16, 2024

Revised: June 30, 2024

Accepted: July 21, 2024

Published: July 31, 2024

1. Pendahuluan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai ibu kota Negara Indonesia, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga pusat kegiatan politik (Budijarto, 2018). Keberagaman penduduk dan kompleksitas masalah perkotaan membuat fasilitas permukiman di Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan politik masyarakat. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 menerangkan tingkat etnis atau suku di DKI Jakarta beraneka ragam dan di dominasi sekitar 35,94% penduduk DKI Jakarta merupakan Suku Jawa, berikutnya 28,11% Suku Betawi, 14,62% Suku Sunda, dan 21,43% suku-suku lainnya. Karena itu masyarakat DKI Jakarta mengalami diversifikasi budaya, yang ditandai oleh pluralitas budaya, berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya saling berinteraksi dan bersaing (Hidayat, 2015).

Keanekaragaman etnis atau suku bisa memengaruhi seberapa mudah atau sulitnya akses masyarakat terhadap fasilitas politik seperti kantor pemerintah, tempat pemungutan suara, atau pusat informasi politik. Dalam konteks DKI Jakarta, dengan populasi yang heterogen, penting untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut dapat diakses dengan mudah oleh semua kelompok etnis atau suku. Tulisan ini akan membahas bagaimana fasilitas permukiman di DKI Jakarta dapat memfasilitasi kegiatan politik dan partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks perkotaan yang dinamis.

Peran fasilitas permukiman dalam kegiatan politik di DKI Jakarta, pertama yaitu ruang publik sebagai tempat diskusi dan organisasi. Jakarta memiliki beragam ruang publik yang dapat digunakan untuk kegiatan politik, seperti balai warga, taman kota, dan ruang serbaguna di permukiman. Ruang-ruang ini sering digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan rapat warga, diskusi kelompok, dan kegiatan kampanye. Sebagai contoh Taman Suropati dan Taman Menteng sering menjadi lokasi pertemuan dan diskusi politik, karena aksesibilitasnya dan lokasinya yang strategis (Ameliya, 2024).

Kedua, fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan seperti perpustakaan daerah dan pusat komunitas, memainkan peran penting dalam menyediakan informasi politik dan menyelenggarakan kegiatan edukasi politik. Jakarta memiliki banyak perpustakaan umum, seperti Perpustakaan Nasional dan perpustakaan-perpustakaan di tingkat kecamatan, yang menyediakan sumber daya informasi mengenai isu-isu politik dan pemerintahan. Selain itu, pelatihan dan seminar yang diadakan di pusat-pusat ini membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat.

Ketiga, fasilitas teknologi dan infrastruktur komunikasi Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki akses internet yang luas dan infrastruktur teknologi yang baik. Fasilitas ini memungkinkan warga untuk terhubung dengan informasi politik secara cepat melalui media digital dan sosial. Banyak komunitas di Jakarta yang memanfaatkan media sosial untuk berdiskusi dan mengorganisir kegiatan politik. Akses internet yang baik juga mempermudah masyarakat dalam mengikuti perkembangan politik baik lokal maupun nasional, serta berpartisipasi dalam petisi *online*, survei, dan diskusi Dalam Jaringan (Daring) (Bachtiar et al., 2023).

Keempat, fasilitas sosial dan kesehatan seperti puskesmas dan Posyandu, sering digunakan untuk kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah. Puskesmas, misalnya dapat menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, Posyandu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, yang sering kali memiliki implikasi politik (Junaedi, 2019).

2. Metode

Penelitian ini merupakan studi literasi dan kependudukan dalam implementasi SNI 03-1733-2004.

3. Hasil

Salah satu fasilitas yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah mengenai fasilitas yang ada di tingkat kecamatan DKI Jakarta berdasarkan standar dari SNI, dilihat dari jumlah penduduk, rasio SNI dan rasio kebutuhan, ditemukan ada 15 Kecamatan (Tabel 1) yang memenuhi dengan standar SNI dan 29 kecamatan (Tabel 2) yang belum memenuhi dengan standar SNI dalam konteks ini diindikasikan akan mengalami kurang optimal.

Tabel 1. Daftar Kecamatan yang Memenuhi Standar SNI untuk Jumlah Penduduk yang Dapat Dilayani

Variabel	Frekuensi	Persentase
Remaja Pertengahan (15-17 Tahun)	69	94,5
Remaja Akhir (18 Tahun)	4	5,5
Total	73	100,0

Tabel 2. Daftar Kecamatan yang Belum Memenuhi Standar SNI untuk Jumlah Penduduk yang Dapat Dilayani

Variabel	Frekuensi	Persentase
Tidak Mempunyai Masalah Kesehatan Mental Nilai skor < 7	48	65,8
Mempunyai Masalah Kesehatan Mental Nilai skor \geq 7	25	34,2
Total	73	100,0

Kemudian fasilitas lainnya, mengenai fasilitas yang ada di tingkat kelurahan DKI Jakarta berdasarkan standar dari SNI yakni jumlah penduduk yang disarankan untuk dapat dikelola pada sebuah kelurahan adalah 30.000 penduduk per kelurahan. Ini merupakan jumlah ideal dari fasilitas yang ada di tingkat kelurahan dengan jumlah penduduk yang disarankan. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa wilayah kelurahan di tingkat kecamatan yang memiliki titik ideal yang minim dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut.

Jika dilihat dari jumlah penduduk tahun 2023, rasio SNI dan rasio kebutuhan, ditemukan bahwa dari 267 Kelurahan yang ada di DKI Jakarta, hanya terdapat 125 kelurahan yang sudah sesuai dengan standar SNI, berarti 142 Kelurahan lainnya tidak atau belum memenuhi standar SNI. Berikut tabel daftar kelurahan yang memenuhi dan belum memenuhi standar SNI untuk wilayah kelurahan di DKI Jakarta.

Tabel 3. Daftar Jumlah Kelurahan di Kecamatan yang Memenuhi Standar SNI untuk Jumlah Penduduk yang Dapat Dilayani

Variabel	Frekuensi	Persentase
Tuntas Nilai Semua mata pelajaran Siswa \geq KKM 75	43	58,9
Tidak Tuntas Ada Salah Satu Mata Pelajaran Siswa di bawah KKM (75)	30	41,1
Total	73	100,0

Tabel 4. Daftar Jumlah Kelurahan di Kecamatan yang Belum Memenuhi Standar SNI untuk Jumlah Penduduk yang Dapat Dilayani

Kesehatan Mental	Prestasi Belajar				Total	p value	OR
	Tuntas	%	Tidak Tuntas	%			
Tidak mempunyai masalah kesehatan mental	37	86,047	11	36,667	48	0,000	10,652
Mempunyai masalah kesehatan mental	6	13,953	19	63,333	25		
Total	43		30		73		

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pada distribusi frekuensi responden berdasarkan prestasi belajar menunjukkan sebagian besar remaja tuntas nilai mata pelajaran sebanyak 43 responden (58,9%). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa siswa yang mengalami masalah kesehatan mental ternyata prestasi belajarnya tuntas. Pada kasus di atas terjadi perbedaan dengan teori tapi ini bisa saja terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena faktor kecerdasan atau *Intelligence Quotient* (IQ). Data terkini dari studi perilaku memberikan bukti kuat bahwa IQ nasional memiliki korelasi antara 0,87 dan 0,93 dalam pembelajaran (Song & Su, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja di SMK yaitu sebanyak 92 orang (42,6%). Bahwa usia merupakan faktor utama yang mempengaruhi mental emosional pada remaja, karena pada usia 13 tahun tersebut rentan mengalami masalah mental emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 108 orang (50%) remaja berjenis kelamin laki-laki dan 108 orang (50%) remaja berjenis kelamin perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devita, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Putri Utami (2017) dengan penelitian menggunakan survei dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

sehat secara mental sebanyak 76,3%. Kesehatan mental dipengaruhi oleh kondisi kesejahteraan individu dan lingkungan masyarakat sekitar.

Menurut asumsi peneliti pada kasus prestasi belajar yang terjadi pada banyaknya siswa tidak tuntas sekitar 41,1 % atau sekitar 30 orang dari 73 responden yang diteliti dimana nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan nilai 7,5 setiap mata pelajarannya disebabkan karena kurangnya motivasi dan perhatian pada siswa dalam mengikuti setiap mata pelajaran di sekolah, terlihat dari hasil yang didapat dari nilai lebih dari 50% siswa pernah membolos bahkan ketika ulangan berlangsung sehingga nilai ulangan terlihat kosong. Ketika peneliti menanyakan pertanyaan nomor 3 apakah tidur anda lelap, banyak yang menjawab tidak. Beberapa responden mengatakan sering tidur malam atau begadang. Ada yang begadang karena main *gadget* atau main atau kumpul dengan teman. Sehingga masuk sekolah pagi hari siswa tidak dalam keadaan segar yang dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi belajar pada siswa. Mustajab & Abdullah (2019) mengatakan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam masa perkembangannya remaja sangat rentan terhadap stres, frustrasi, dan konflik (Estuningtyas, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian hubungan kesehatan mental dengan prestasi belajar pada remaja dari 73 responden terdapat total 43 responden yang nilainya tuntas. Dari jumlah tersebut terdapat 37 responden (86,047%) tidak mempunyai masalah kesehatan mental dan 6 responden (13,953%) mempunyai masalah kesehatan mental. Siswa prestasi belajarnya tidak tuntas sebanyak 30 Responden dengan nilai yang tidak tuntas. Dari jumlah tersebut 11 orang (36,667%) tidak mempunyai masalah kesehatan mental dan 19 responden (63,333%) mempunyai masalah kesehatan mental. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa kesehatan mental berkorelasi signifikan dengan motivasi berprestasi ($p < 0,001$), namun tidak memiliki korelasi dengan keberhasilan pendidikan ($p = 0,37$) (Mahdavi et al., 2023). Sedangkan hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwa ditemukan hubungan negatif antara masalah kesehatan mental dan hasil pendidikan, hasil ini hampir tidak bergantung pada kontrol, hanya perbedaan kecil antara kedua jenis kelamin yang terdeteksi (Brännlund et al., 2017).

Dari hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value} = 0,00$ ($p\text{-value} \leq \alpha = 0,00$) ($p\text{-value} \leq \alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kesehatan mental dengan prestasi belajar pada remaja. Dari nilai OR 10,652 dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental berpengaruh 10 kali lebih besar dengan prestasi belajar. Seseorang yang mencari ilmu sangat memerlukan kesiapan fisik yang prima, akal yang sehat, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Gejala tekanan yang lebih besar dikaitkan dengan kebiasaan akademis dan efikasi diri yang lebih buruk (Jeffries & Salzer, 2022).

5. Kesimpulan

Berdasarkan satu studi kasus diatas kita bisa melihat, masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan fasilitas bagi masyarakat, baik fasilitas pemerintahan maupun fasilitas permukiman. Fasilitas permukiman di DKI Jakarta memainkan peran krusial dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan politik masyarakat. Dengan menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan mudah diakses, fasilitas ini membantu meningkatkan partisipasi politik, memperkuat komunitas, dan mendukung proses demokrasi yang inklusif dan efisien. Pemanfaatan yang optimal dari fasilitas permukiman juga berkontribusi pada pengembangan politik lokal yang lebih dinamis dan partisipatif.

Mengatasi tantangan seperti aksesibilitas, keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang demokratis dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan

*Corresponding Author**: Nur Iman Santoso
E-mail: nurimans@gmail.com
Affiliation: Universitas Indonesia Maju, Indonesia

Article history

Received: June 16, 2024

Revised: June 30, 2024

Accepted: July 21, 2024

Published: July 31, 2024

untuk memastikan bahwa fasilitas permukiman benar-benar mendukung kegiatan politik yang konstruktif dan bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta.

Saran untuk meningkatkan peran dan fungsi fasilitas permukiman dalam mendukung kegiatan politik masyarakat di DKI Jakarta diantaranya pemerintah dan pengelola permukiman harus meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang ada agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan politik, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki kepemilikan terhadap proses politik di lingkungannya.

6. Acknowledgement

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

7. Conflict of Interest

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada kepentingan keuangan, profesional, atau pribadi yang mempengaruhi kinerja dan hasil penelitian ini.

8. Daftar Pustaka

- Ameliya, T. M. (2024). Ruang Publik sebagai Oase di Tengah Hiruk-pikuk Jakarta. <https://www.antaraneews.com/berita/3919455/ruang-publik-sebagai-oase-di-tengah-hiruk-pikuk-jakarta>
- Bachtiar, F., Rejeki, V. S., Tarigan, R., Ardiyanto, A., & Muljadinata, A. S. (2023). Kesesuaian Ruang Publik Di Dki Jakarta Sebagai Ruang Ketiga Di Era Digital. *Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan Dan Lingkungan*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2023.v12i2.004>
- Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Badan Standardisasi Nasional, 1–58.
- Bappeda DKI Jakarta. (2005). RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025.
- Budijarto, A. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34, 1–87. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_34_Juni_2018.pdf
- Hidayat, A. A. (2015). Mayoritas Penduduk DKI Jakarta Merupakan Suku Jawa. <http://www.kangatepafia.com/2015/05/mayoritas-penduduk-dki-jakarta>.
- Iman Santoso, N., & Chotib, C. (2024). Spatial Analysis of The Suitability In Number of TPS at Kelurahan Based on Area And Number of DPT In DKI Jakarta Election 2017. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(3), 1130–1138. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i3.965>
- Junaedi, A. (2019). Peran Posyandu dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Tinjauan Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*.
- PKPU Nomor 6 Tahun 2016 (2016).
- UU Nomor 29 Tahun 2007 (2007)